

IV. GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebutan ini layak untuk ibu kota Propinsi Lampung. Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur sumatera.

Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perkotaan yang terus berkembang dari daerah tengah ke daerah pinggiran kota yang ditunjang fasilitas perhubungan dan penerangan. Perkembangan kota ditandai dengan tumbuhnya kawasan permukiman, namun demikian daerah pinggiran belum terlihat jelas ciri perkotaannya. Pada tahun 2001 Kota Bandar Lampung dimekarkan dari sembilan kecamatan dan 84 kelurahan menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan.

Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara $50^{\circ}20'$ - $50^{\circ}30'$ LS dan $105^{\circ}28'$ - $105^{\circ}37'$ BT dengan luas wilayah $192,96 \text{ km}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Batas Utara : Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

- 2) Batas Selatan : Kecamatan Padang Cermin, Ketibung dan Teluk Lampung, Kabupaten Lampung Selatan
- 3) Batas Timur : Kecamatan Gedung tataan, Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung berada di bagian selatan Propinsi Lampung (Teluk Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera.

B. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung

1. Keadaan Pegawai

Berdasarkan observasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung merupakan badan pemerintahan yang yang berwenang terhadap permasalahan kepegawaian di lingkungan Kota Bandar Lampung. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung ini dipimpin oleh seorang kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan demikian, sebagian besar pegawai yang ada di BKD Kota Bandar Lampung berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun susunan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

Tabel 6. Kondisi Pegawai pada BKD Kota Bandar Lampung Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Orang	Persentase %
1.	CPNS	4	7,27
2.	PNS	51	92,73
	Jumlah	55	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung

Sedangkan kondisi pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan kepangkatannya untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Kondisi Pegawai pada BKD Kota Bandar Lampung Menurut Pangkat/ Golongan Ruang

No.	Golongan	Pangkat				Jumlah Orang	Persentase %
		A	b	c	d		
1	IV	5	1	1	-	7	12,73
2	III	11	15	5	7	38	96,09
3	II	1	2	4	3	10	18,18
4	I	-	-	-	-	-	0

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung

Keterangan :

IV/c : Pembina Utama Muda

IV/b : Pembina tingkat I

IV/a : Pembina II

III/d : Penata tingkat I

III/c : Penata

III/b : Penata Muda Tingkat I

II/d : Pengatur tingkat I

I/a : Juru

II/b : Pengatur Muda Tingkat I

II/a : Pengatur Muda

I/b : Juru tingkat I

II/c : Pengatur

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa golongan jabatan terbanyak pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung adalah golongan III/b yaitu sebanyak 15 orang. Sedangkan golongan jabatan tertinggi adalah golongan IV/c sebanyak 1 orang dan untuk golongan II ada 10 orang. Dilain pihak, untuk melihat pendidikan formal para pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8. Kondisi Pegawai BKD Kota Bandar Lampung Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase %
1	Pasca Sarjana	9	16,36
2	Sarjana	29	52,73
3	Diploma III	4	7,27
4	Diploma I,II	-	-
5	SLTA	12	21,82
6	SLTP	-	-
7	SD	1	1,82
	Jumlah	55	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 7. kondisi PNSD pada BKD Kota Bandar Lampung menurut tingkat pendidikan formal diatas dapat diketahui bahwa persentase terbesar lulusan sarjana (S1) yaitu sebesar 52,73% atau sebanyak 29 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang menyelesaikan studi hingga pasca sarjana sebesar 16,36% atau 9 orang dari keseluruhan pegawai yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa sebagian besar pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, meskipun ada beberapa pegawai yang berlatar belakang pendidikan SD maupun SLTA. Dengan demikian sumber daya manusia yang dimiliki oleh badan kepegawaia daerah kota Bandar Lampung sudah cukup bagus. Hal ini sangat mendukung dalam output kebijakan yang dirumuskan.

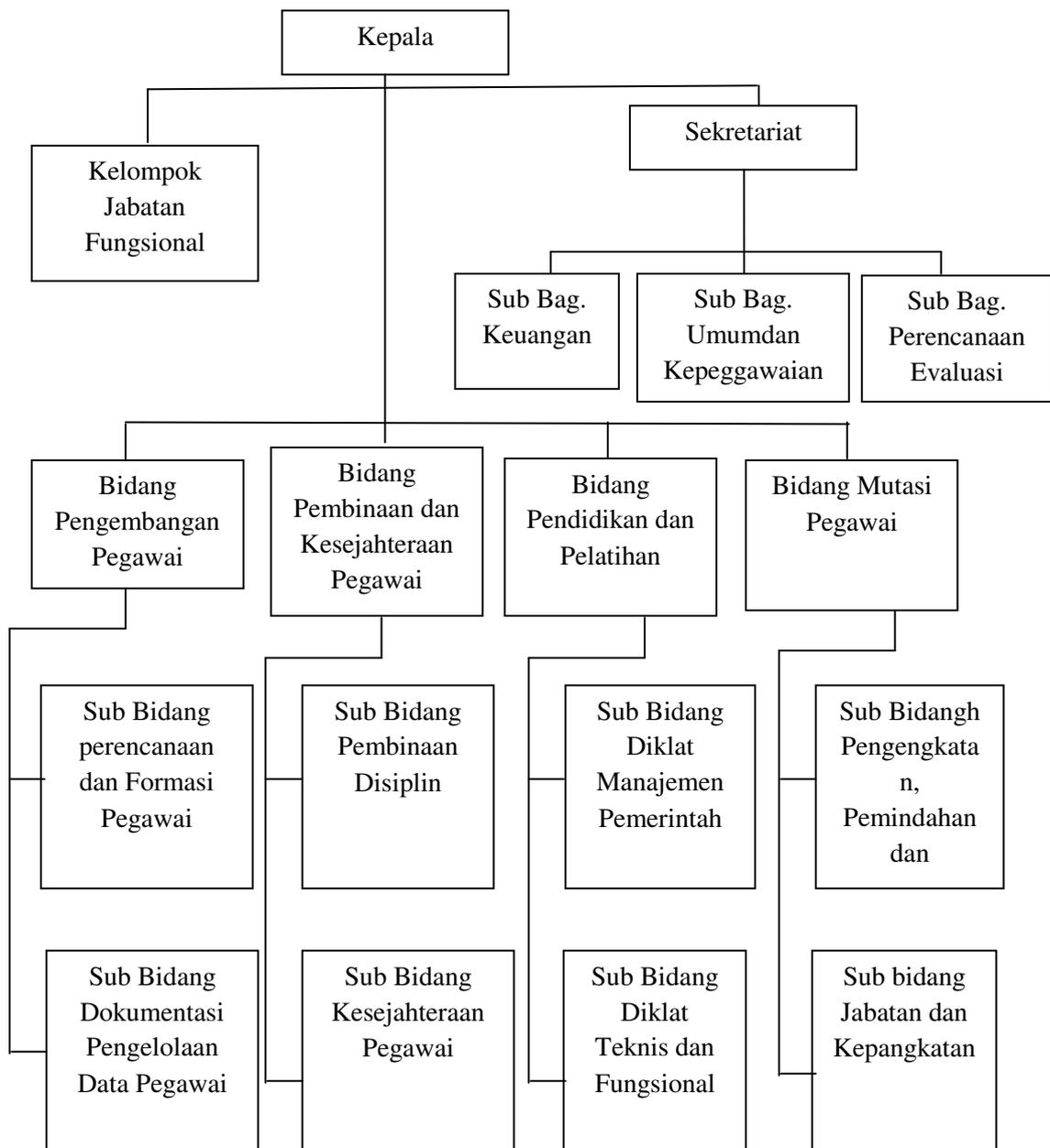
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu organisasi lembaga teknis daerah yang dibentuk berdaasrkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan secara khusus pembentukan BKD mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja BKD Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2008.

BKD Kota Bandar Lampung mempunyai visi yaitu terwujudnya aparatur pemerintah Kota Bandar Lampung yang profesional dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai budaya dan etika guna peningkatan pelayanan prima. Sedangkan misi BKD Kota Bandar Lampung adalah mewujudkan pelayanan prima dibidang kepegawaian berdasarkan kejelasan dan kepastian proses serta kualitas hasil kerja dan mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional dan sejahtera melalui peningkatan mutu manajemen sumber daya aparatur.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BKD Kota Bandar Lampung dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung



Sumber: Profil BKD

2. Tugas Pokok dan Fungsi

BKD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian. Tugas pokok BKD tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan,
- b. Penyusunan rencana program, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan,
- c. Pemeliharaan informasi kepegawaian,
- d. Pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai,
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian,
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai,
- g. Penyelenggaraan sosialisasi,
- h. Pembinaan jabatan fungsional.

Berdasarkan gambar bagan I di atas, struktur organisasi BKD Kota Bandar Lampung berdasarkan peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2008 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kepala

Kepala badan adalah kepala kantor BKD yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas

secara terpadu, pelayanan, administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahkan:

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
- 2) Subbagian Keuangan,
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengembangan Pegawai

Tugas bidang pengembangan pegawai adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan formasi pegawai, dan dokumentasi pengelolaan data pegawai. Bidang pengembangan pegawai terdiri dari:

- 1) Subbidang Perencanaan dan Formasi Pegawai,
- 2) Subbidang Dokumentasi Pengelolaan Data Pegawai.

d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Pada bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai membawahkan:

- 1) Subbidang Pembinaan Pegawai,
- 2) Subbidang Kesejahteraan Pegawai.

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di

bidang pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, teknis dan fungsional.

Bidang pendidikan dan pelatihan membawahkan:

- 1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan,
- 2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

f. Bidang Mutasi Pegawai

Bidang mutasi pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepangkatan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bidang mutasi pegawai terdiri dari:

- 1) Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian,
- 2) Subbidang Jabatan dan Kepangkatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.